



MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Email : journalmudabbir@gmail.com

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Sensus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)

Azhari Alpad

Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Sepakat Segenept Kutacane Aceh Tenggara

Email: azharialpad24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna mencari tahu dampak *Good Governance* bagi PAD di Kabupaten Aceh Tenggara. Fokus pada penelitian ini adalah dua variabel, yakni *good governance* dan pendapatan asli daerah. Aceh tenggara ditetapkan sebagai lokasi penelitian ini dilaksanakan. Dengan mengumpulkan SKPD yang memberikan pelayanan terhadap PAD, maka penelitian ini dianalisis dengan regresi berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat memerlukan sumber data yang dirasa sanggup untuk merancang program guna mendongrak pertumbuhan nilai PAD di daerah tersebut. Namun, pihak pemerintah pun harus tetap menerapkan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap programnya.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of finding out the impact of Good Governance for PAD in Southeast Aceh District. The focus of this research is on two variables, namely good governance and local revenue. Southeast Aceh was designated as the location for this research to be carried out. By collecting SKPDs that provide services to PAD, this study was analyzed using multiple regression. The results of this study conclude that Southeast Aceh Regency still desperately needs data sources that are deemed capable of designing programs to boost the growth of PAD values in the area. However, the government must continue to implement accountability and transparency in each of its programs.

Keywords: Good Governance, Local Revenue (PAD).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah selayak sudah mewarnai sistem pemerintahan dengan warna yang baru dengan diberlakukannya otonomi daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa sistem pemerintahan mempunyai hak serta wewenang dan kewajibannya sebagai daerah otonom dengan mengurus keperluan masyarakat dan pemerintahannya sendiri (Rochman, 2000).

Sesuai dengan fakta yang terlihat di lingkungan, tampak bahwa tidak stabilnya pemerintahan dalam bidang manajemen keuangan disebabkan oleh penerapan otonomi daerah yang kurang tepat serta hal tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam mempersiapkan rancangan pemerintah daerah ke depannya (Haryadi, 2002; Mardiasmo, 2002).

Terdapat pernyataan bahwa perlunya dilakukan perbaikan serta pemberian terhadap sistem pemerintahan daerah saat ini. Salah satunya adalah dampak negatif yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi bentuk mandiri serta kekokohan sistem pertahanan daerah itu sendiri. Aturan perundang-undangan yang membahas mengenai tatanan sistem pemerintahan daerah cenderung mengarah pada dua bidang, di antaranya proses pembersihan praktik sistem yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab, serta proses mengolah tatanan sistem tersebut supaya berfungsi dengan baik.

Maka untuk menggapai hal tersebut, hal yang perlu diterapkan oleh pemerintah adalah sistem pemerintahan yang baik alias *good governance* yang berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah diberlakukannya transparansi, akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi dalam pencapaian target yang diinginkan. Kooiman dalam Setyawan (2004: 224) menyebutkan bahwa governance adalah rangkaian interaksi dalam ruang lingkup sosial dan politik diantara masyarakat dan pemerintah. Hak penuh atas kepentingan masyarakat dipegang oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Pengimplementasian tata kelola yang bijak harus diterapkan disetiap prinsip yang diyakini dengan tetap berlandaskan aturan perundang-undangan, seperti supremasi hukum, partisipasi, transparansi, konsensus, serta akuntabilitas dan visi strategis yang efektif (Tingkilisan, 2005: 113; Gujarati, 2003). Banyaknya variasi prinsip yang menjadi landasan tata pemerintahan, menjadi pilihan umum di Indonesia, dan dalam hal *good governance* ini, prinsip utama yang dianut adalah transparansi dan akuntabilitas.

Indonesia saat ini memberlakukan akuntabilitas yang diatur pada LAKIP dengan penjelasan hubungan internal atas dan memperhatikan pencapaian target yang telah ditentukan dalam sebuah misi organisasi (Kurniawan, 2009: 116-121). Semestinya akuntabilitas ini juga ditujukan kepada masyarakat terkait dan tidak pada para pemegang jabatan saja (Callahan, 2007). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja pemerintah.

Mengenai transparasi dalam pemerintahan, dengan tetap melibat masyarakat serta setiap aktivitas pemerintah yang tidak dirahasiakan (Katz, 2004). Transparansi yang memadai akan turut memaksimalkan akuntabilitas sistem pemerintahan karena kedua hal tersebut saling memberikan pengaruh satu sama lain. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul, *“Implementasi Good Governance Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Aceh Tenggara”*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan hipotesis, yakni implementasi *good governance* dengan unsur akuntabilitas serta transparansi yang memberikan pengaruh bagi PAD di Kabupaten Aceh Tenggara, baik secara parsial atau simultan. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif, yang dimana data dikumpulkan dengan menerapkan kuisioner menggunakan acuan sensus dengan periode waktu *cross sectional*. Sekaran (2003: 138) menyebutkan bahwa Cross Sectional adalah proses pengumpulan data dengan subjek yang tidak sama. Pada penelitian ini, analisis kausalitas menjadi jenis desain yang dipilih oleh peneliti. Variabel penelitian yang digunakan yaitu

transparansi, akuntabilitas, serta PAD. Dan setiap indikatornya menerapkan skala ordinal dalam pengukuran variabel terkait.

Dengan melibatkan sebanyak 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Aceh Tenggara, yang dijadikan sebagai populasi penelitian ini dan dengan menerapkan *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan menerapkan sistem kuisioner yang disebarluaskan kepada para responden dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya (Assingkily, 2021). Dalam proses analisis hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) diterapkanlah sistem analisis regresi berganda, dengan persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Di mana :

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_0 : konstanta, yaitu nilai Y apabila setiap variabel X bernilai nol

β_1 : koefisien regresi dari X1

β_2 : koefisien regresi dari X2

X1 : transparansi

X2 : akuntabilitas

ε : variabel lain yang tidak diuji

PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji Statistik F

Proses pengujian ini diterapkan guna mencari tahu hubungan signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen secara keseluruhan, dengan menerapkan rumus:

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Di mana:

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen

n : ukuran sampel

Uji Koefisien determinasi (R2)

Pengujian ini diterapkan guna mencari tahu besarnya variasi dalam variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen secara keseluruhan, dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_Y}$$

Di mana:

JK_R : jumlah kuadrat regresi (*explained sum of square*)

JK_Y : jumlah total kuadrat (*total sum of square*)

Uji Statistik t

Pengujian ini diterapkan guna mencari tahu hubungan signifikan antara konstanta dan variabel independen, dengan memperhatikan rumus berikut:

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta i}}$$

Di mana:

β_i : koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas

$S_{\beta i}$: standard error dari β_i

Menghitung Koefisien Determinasi Parsial

Perhitungan koefisien determinasi parsial dilakukan dengan memperhatikan besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara parsial bagi variabel dependen, dengan ketentuan koefisien korelasi sebagai berikut:

- < 0,20 sangat lemah
- 0,20 – 0,40 lemah
- 0,40 – 0,70 sedang
- 0,70 – 0,90 kuat
- 0,90 – 1,00 sangat kuat

RESULTS

Uji Validitas

Pengujian dilakukan berdasarkan data kuesioner yang terkumpul dari 70 responden, dan hasil kuisioner tersebut dinyatakan valid dengan ketentuan r hitung > r kritis.

Uji Realibilitas

Berikut hasil uji realibilitas dari penelitian ini, yaitu:

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Ket.
Transparansi	0,850	0,70	Reliabel
Akuntabilitas	0,873	0,70	Reliabel
PAD	0,957	0,70	Reliabel

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

Tabel 2 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			14
Normal Parameters	a,b	Mean	.0000000
		Std. Deviation	.13465880
Most Extreme Differences		Absolute	.130
		Positive	.124
		Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z			.485
Asymp. Sig. (2-tailed)			.973

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 2, uji Kolmogorov- Smirnov senilai 0,973. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), artinya model regresi tersebut tergolong normal.

2) Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations			absolut_error
Spearman's rho	Transparans	Correlation Coefficie	.057
		Sig. (2-tailed)	.846
		N	14
Akuntabilitas		Correlation Coefficie	.014
		Sig. (2-tailed)	.963
		N	14

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari koefisien korelasi masing-masing variabel independen nilai absolut error (yaitu 0,846 dan 0,963) $> 0,05$.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian Koefisien Regressi Secara Bersama-sama

Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah guna memberikan pembuktian atas transparansi serta akuntabilitas dalam memberikan pengaruh bagi pendapatan asli daerah, yakni dengan memperhatikan tabel berikut:

Tabel 4. Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama

ANOVA					
Mode	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi	.403	2	.202	9.410
	Residual	.236	11	.021	
	Total	.639	13		

a.Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel anova di atas, terlihat bahwa nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 9,410 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada $\alpha = 0.05$ dan derajat dan derajat bebas (2:11) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,982. Karena F_{hitung} (9,410) $> F_{tabel}$ (3,982) maka transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh signifikan bagi pendapatan asli daerah di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pengujian Koefisien Regressi Secara Parsial

Tabel 5. Nilai t_{hitung} Masing-Masing Variabel Independen

Model	Coefficients				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
1	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-.658	.755	-.871	.402
	Transparans	.465	.206	.416	.045
	Akuntabilitas	1.131	.328	.635	.005

a. Dependent Variable: PAD

Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) senilai 2,201 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dengan derajat bebas 11 dalam pengujian dua arah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,261 serta nilai dengan nilai signifikansi sebesar 0,045. Dapat disimpulkan bahwa transparansi memberikan pengaruh yang signifikan bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tenggara yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5 menghasilkan t_{hitung} variabel akuntabilitas dengan nilai 3,450 serta nilai signifikansi 0,005. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas, yang dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

PEMBAHASAN

Dengan dilakukannya uji hipotesis secara parsial ataupun secara simultan memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Maka akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan dengan maksimal dalam sistem pemerintahan tersebut untuk memaksimalkan kinerja serta proses pencapaian target.

Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat memerlukan sumber data yang dirasa sanggup untuk merancang program guna mendongkrak pertumbuhan nilai PAD di daerah tersebut. Namun, pihak pemerintah pun harus tetap menerapkan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap programnya.

SIMPULAN

Adapun simpulan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat memerlukan sumber data yang dirasa sanggup untuk merancang program guna mendongkrak pertumbuhan nilai PAD di daerah tersebut. Namun, pihak pemerintah pun harus tetap menerapkan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap programnya. Dengan dilakukannya penelitian ini, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap PAD di pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, di mana hal tersebut salah satu bentuk *good governance*.

REFERENCES

Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.

Callahan, K. (2007). *Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability and Participation*. Florida: CRC Taylor & Francis Group.

Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrica*. 4th Edition. New York: McGraw-Hill.

Haryadi, B. (2002). "Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Provinsi Jawa Timur)" *Simposium Nasional V Semarang*, 5-6 September.

Katz, E. M. (2004). "Transparency in Government How American Citizens Influence Public Policy", *Journal of Accountancy*, US Department of State, International Information Programs.

Kurniawan, T. (2009). "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan", *Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2). <http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/jbb/article/download/612/597>.

Mardiasmo, M. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Rochman, M. G. (2000). *Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya dalam HAM*. Jakarta: Komnas HAM.

Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Fourth Edition Wiley.

Setyawan, D. (2004). *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Tingkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Penerbit Grasindo.